

# STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM DESA WISATA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Indah Ayu Lestari<sup>1\*</sup>, Samsir Rahim<sup>2</sup>, Rasdiana<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*Development strategy is the plan of an organization or government in improving the Abstract Development strategy was the plan of an organization or government in improving the performance of quality human resources. This study aimed to find out the strategy of developing a tourism village program in realizing an independent village. This study used a qualitative descriptive type of research, to provide an overview of the tourism village program development strategy in realizing an independent village. The data analysis technique used data reduction, data presentation and conclusion. Then the data collection techniques used observation, interviews and documentation studies. The results of the study showed that the strategy implemented had not shown maximum results, this was evidenced by the 4 indicators used as follows: (a) HR, tourism village managers who still needed training and coaching; (b) Funds, which were still lacking and had not been channeled directly for the development of existing tourism objects, especially in the lagoon beach tourism of Bontolebang village, which were still lacking in terms of infrastructure; (c) Information and technology, had made efforts to promote through print media, social media and had an official website; and (d) Infrastructure facilities were still lacking in carrying out their role as facilitators. Judging from the lack of available facilities, especially in the tourist village of Bontolebang.*

**Keywords:** *development strategy, touris*

## Abstrak

Strategi pengembangan adalah rencana suatu organisasi maupun pemerintah dalam meningkatkan kinerja SDM yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan desa mandiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, untuk memberikan gambaran mengenai strategi pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan desa mandiri. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal itu dibuktikan dengan ke 4 indikator yang digunakan sebagai berikut: (a) SDM, pengelola desa wisata yang masih memerlukan pelatihan dan pembinaan; (b) Dana, masih kurang dan belum menyalurkan langsung untuk pengembangan objek wisata yang ada dilokasi terkhusus di wisata pantai laguna desa Bontolebang yang masih kurang dalam hal infrastuktur; (c) Informasi dan teknologi, telah berupaya dalam melakukan promosi melalui media cetak, social media dan memiliki website resmi; dan (d) Sarana prasarana, masih kurang dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator. Dilihat dari minimnya fasilitas yang tersedia terkhusus di desa wisata bontolebang.

**Kata kunci:** strategi pembangunan, pariwisata

---

\* indahayulestari@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pariwisata memiliki peran penting hal ini karena pariwisata menjadi salah satu sektor industri yang laju pertumbuhannya berjalan secara cepat. Sehingga sektor pariwisata dikatakan sebagai salah satu penyumbang penghasilan bagi negara Indonesia. Di Indonesia pariwisata sangat berkembang pesat, hal ini karena Indonesia sendiri memiliki banyak tempat, kuliner, adat dan budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung.

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pengembangan sektor ekonomi kreatif yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain menyumbang penghasilan bagi negara, pariwisata juga memberikan banyak manfaat perubahan yang luas.

Desa wisata ialah kondisi desa yang menawarkan suasana keaslian kehidupan pedesaan, keaslian kehidupan yang dimaksud seperti sosial budaya, adat istiadat, keseharian, sosial, ekonomi, sejarah, arsitektur bangunan tata ruang desa yang memiliki ciri khas dan kegiatan ekonomi yang menarik dan unik karena memiliki potensi untuk akomodasi, makanan, minuman, dan lainnya.

Pada proses pembangunan desa wisata salah satu aspek yang harus diperhatikan selain aset manusia ialah keberagaman bangsa dan kekayaan alam. Bangsa Indonesia memiliki banyak potensi hingga kesempatan berharga untuk membangun pariwisata Indonesia supaya lebih mudah dilirik oleh mata dunia karena mempunyai karakteristik yakni kearifan lokal. Sehingga dalam hal ini pemerintah mempunyai peran penting dalam menggali potensi dan membuat aturan terhadap potensi pengembangan pariwisata.

Seperti pada Kabupaten Kepulauan Selayar Pengembangan destinasi pariwisata akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengelolaan sumber-sumber daya pariwisata. Posisi sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat penting sebagai salah satu bisnis inti. Dengan penetapan pariwisata sebagai salah satu bisnis inti, perhatian pemerintah khususnya di Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap pengembangan pariwisata akan bertambah besar dan pembangunan pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Tujuan pengembangan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar adalah menjadikan

pariwisata sebagai bagian dalam mewujudkan dan mengisi pola pembangunan pariwisata nasional, dan salah satu kegiatan ekonomi serta sumber pendapatan daerah.

Program desa wisata ini belum berjalan dengan maksimal dalam hal mewujudkan desa mandiri, hal ini terlihat dari pengelolaan destinasi pariwisata, infrastruktur pariwisata dan komponen pariwisata, yang belum memadai bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung. Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan kesadaran masyarakat khususnya pemerintah setempat yang memiliki andil untuk dilakukan sebuah pengoptimalan suatu program desa wisata dalam mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga bisa menjadikannya sebagai potensi untuk meningkatkan pengembangan dan perekonomian desa dan menjadikannya objek wisata yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi sehingga hal ini juga akan memberikan pemasukkan untuk peningkatan ekonomi di daerah kabupaten Kepulauan Selayar yang masih kurang maksimal khususnya 5 Desa Wisata Unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar akan menjadikan pusat destinasi khususnya di Indonesia dan bahkan manca negara.

Menurut Bryson (2005:69-70) Strategi merupakan pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menekankan pada bagaimana organisasi, apa saja yang dikerjakan, dan alasan organisasi mengerjakannya. Strategi yang efektif harus memenuhi kriteria seperti harus dapat bekerja, secara politik dapat diterima oleh stakeholder, sesuai filosofi dan nilai organisasi, memiliki etika, moral, hukum organisasi, serta harus mampu menghadapi isu strategis yang mesti diselesaikan. Menurut Crown Dirgantoro (2010:5), strategi adalah hal yang menetapkan arah kepada manajemen dalam arti orang tentang sumber daya dalam bisnis dan tentang bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan dalam pasar.

Menurut Gamal Sumantoro (2004:55) dalam Mamonto, n.d. (2021:5) Strategi pengembangan pariwisata bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbangan dan bertahap.

Dalam melakukan sebuah pengembangan pariwisata daerah, peran pemerintah sangat mutlak dibutuhkan dengan tujuan pengembangan

pariwisata tersebut mengarah pada pembangunan daerah. Menurut Pinata (2005:56), pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu di tata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Strategi pengembangan terdiri dari empat indikator menurut Chandler dalam (Paradana et al., 2021:1820) yaitu: 1) Sumber Daya, merupakan individu atau pelaku industri pariwisata yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki interaksi atau keterkaitan dengan seluruh komponen masyarakat. 2) Dana, dibutuhkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang mendukung perkembangan pariwisata, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik disektor pariwisata digunakan untuk pembangunan infastruktur sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik digunakan untuk pelatihan masyarakat lokal demi meningkatkan

kualitas sumber daya mausia (SDM). 3) Informasi dan Tekhnologi, peranan informasi dan teknologisangatlah besar dalam sektor pariwisata, karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih mudah tentang tempat-tempat wisata yang ada sekalipun didaerah terpencil sekalipun. Peran tekhnologi informasi dan komunikasi sangat besar sekali, saat ini hampir semua orang memiliki sosmed, punya handpone dan gampang membuka akses informasi. 4) Sarana dan Prasarana, unsur-unsur yang melengkapi dengan tujuan memudahkan prosesi kegiatan pariwisata agar dapat berjalan lancar adalah sarana dan prasarana. Pada objek wisata di desa wisata masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud desa wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen

kepariwisataan (Soetarso Priasukmana, 2001: 37).

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001: 38), penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut: 1) Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. 2) Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. 3) Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaanya. 4) Keamanan di desa tersebut terjamin. 5) Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai. 6) Beriklim sejuk atau dingin. 7) Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Adapun konsep penting dalam komponen desa wisata. Sebagaimana menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012: 69), terdapat dua konsep penting dalam komponen desa wisata, yaitu: 1) Akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang

atas konsep tempat tinggal penduduk. 2) Atraksi adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa, membatik dan lain sebagainya yang lebih spesifik.

Pada hakekatnya, pembangunan desa wisata membutuhkan sebuah strategi dan pendekatan yang tepat demi kelangsungan terciptanya sebuah kawasan desa wisata. Sebagaimana strategi dan pendekatan dalam bidang pariwisata menurut Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia tentang pembangunan desa wisata. Dalam konsep pendekatan dan strategi Program PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan dengan strategi, sebagai berikut: 1) Pemberdayaan Masyarakat, seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan. 2) Keberpihakan Kepada yang Miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada masyarakat miskin. 3) Desentralisasi, memberikan

ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat. 4) Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan. 5) Keadilan dan Kesetaraan Gender, masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata harus menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam bidang kepariwisataan serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan. 6) Keswadayaan, masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan. 7) Keterpaduan Program Pembangunan Program yang dilaksanakan secara sinergi dengan program pembangunan yang lain. 1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan, meningkatkan kemampuan LKM dan kelompok masyarakat dalam

pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 2) Pembangunan Pariwisata yang terintegrasi, dalam pembangunan pariwisata melibatkan sektor lain yang terkait. 3) Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian paska pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagukannya untuk kesejahteraan.

Desa mandiri dapat diartikan sebagai emansipasi desa bukan tentang desa berdiri sendiri, namun lebih tepatnya merupakan persamaan hak dan kebebasan dalam kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan adat istiadat dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat setempat, tetap berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan desa mandiri mempunyai tujuan utama untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi desa itu sendiri. Dengan pengembangan potensi desa dapat menciptakan suatu kemandirian desa yang tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Pada hakekatnya, tujuan dari pembangunan desa mandiri adalah sebagai berikut: 1) Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja, 2) Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa. 3) Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. 4) Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

Ismayanti (2010) dalam (Wardana et al., 2020) Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Pariwisata adalah kegiatan dengan melakukan perjalanan dalam hal rekreasi. Dijelaskan pula oleh (Murphy, 1985) bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang tujuan utamanya adalah melakukan perjalanan menuju sebuah tujuan objek wisata maupun industri. Suatu tempat yang memiliki potensi wisata perlu diadakan pengembangan untuk menjadi puing penghasil ekonomi.

Kementerian Pariwisata (2011) menjelaskan bahwa kriteria dalam menentukan desa yang akan dijadikan desa wisata adalah memiliki potensi wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata, memiliki aksesibilitas, dan sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan aktivitas wisata yang sudah ada dan terkenal. Berikut penjelasan terkait kriteria desa wisata. a) Keberadaan/kedekatan dengan objek wisata yang sudah ada, Sastrayuda (2010) menjelaskan lebih lanjut bahwa desa wisata akan lebih baik jika sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan objek wisata. Hal tersebut akan mendukung kemudahan dalam melakukan pengembangan desa menjadi desa wisata. b) Memiliki potensi wisata, potensi desa yang dapat dijadikan sebagai objek wisata adalah potensi sumberdaya alam, budaya, dan pertanian. 1) Potensi sumberdaya alam, daya tarik keseluruhan atau sebagian bentang alam berupa gunung, laut, sungai, dan sebagainya yang merupakan anugerah dari tuhan (Muntasib *et al.* 2014). Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2011) menjelaskan bahwa sebagian besar potensi sumberdaya alam yang ada di Indonesia terletak di wilayah pedesaan. Teguh dan Avenzora (2013)

menjelaskan lebih lanjut bahwa pemanfaatan potensi alam dalam pengembangan desa wisata dapat membantu dalam upaya melestarikan dan menjaga keaslian serta keindahan alam yang dimiliki desa. 2) Potensi budaya, kebudayaan tidak lepas dari kehidupan masyarakat, umumnya pada masyarakat pedesaan (Sastrayuda 2010). Kebudayaan dapat berupa sistem kehidupan masyarakat desa, kesenian tradisional, makanan khas, dan sebagainya yang terbentuk akibat dari perilaku kehidupan masyarakat yang sudah turun temurun. 3) Potensi pertanian, masyarakat di wilayah pedesaan umumnya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, hal ini menggambarkan bahwa lahan di wilayah pedesaan pada umumnya dimanfaatkan untuk sektor pertanian (Teguh dan Avenzora 2013). c) Keterbukaan masyarakat desa, masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat memiliki peran dalam menjaga dan melestarikan keunggulan dari produk wisata pedesaan. Keterbukaan masyarakat berkaitan dengan keinginan masyarakat dalam menerima desanya dijadikan desa wisata dan kesiapan berperan dalam desa wisata (Sastrayuda 2010). d) Aksesibilitas, lokasi desa yang strategis

akan mempermudah akses wisatawan menuju ke desa wisata. Aksesibilitas berkaitan dengan kondisi jalan menuju desa dan kemudahan dalam menentukan transportasi yang akan digunakan (Yoeti 1991 dalam Atmoko 2014).

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam dan memberikan gambaran mengenai strategi pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan desa mandiri. Metode kualitatif inilah yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh data yang lebih rinci dan secara mendalam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap program desa wisata dalam membangun desa mandiri. Wawancara, merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab antara informan dan peneliti. Peneliti mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan

mengenai segala hal yang berhubungan dengan program desa wisata; dan studi dokumentasi, dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan desa mandiri di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada indikator strategi pengembangan yang dikemukakan oleh Chandler (2006) yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Dana, Informasi dan teknologi, dan Sarana dan Prasarana. Adapun uraian penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

### Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan individu atau pelaku industri pariwisata yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki interaksi dengan keterkaitan seluruh komponen pariwisata.

Berbicara tentang sdm perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya baik sdm dari pemerintah, masyarakat maupun penggiat pelaku usaha di sektor pariwisata. Kedepaannya diharapkan sektor pariwisata ini bukan hanya

semata-mata dinas pariwisata dan kebudayaan selaku opd yang diberikan kewenangan untuk bertanggung jawab dalam membina dan mengembangkan di sektor pariwisata, tetapi untuk majunya pariwisata ini secara moral maupun moril itu adalah tanggung jawab kita semua sehingga kita semua memikirkan dan melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan porsi masing-masing pemerintah, masyarakat maupun pelaku penggiat pemerhati wisata apa yang dilakukannya.

Adapun wawancara Kepala Seksi SDM dan Ekraf Pariwisata sebagai berikut: Agar kualitas sumber daya manusia pariwisata dapat meningkat, maka perlu difasilitasi berupa pelatihan dan pembinaan. Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar ada beberapa pelatihan yang diselenggarakan guna peningkatan kinerja SDM yaitu Pelatihan pengelolaan kuliner, Pelatihan pengelolaan desa wisata, Pelatihan pengelolaan *home stay*, Pelatihan digitalisasi branding, dan Pelatihan pengelolaan wisata budaya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata saja tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah,

pihak swasta, serta masyarakat. Kemudian agar sumber daya manusianya memiliki kinerja yang baik dan berkualitas maka perlu memberikan atau mengadakan pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kualitas kinerja.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga melakukan pelatihan dan pembinaan pada pengelola desa wisata agar para pengelola dapat mengetahui cara pelayanan terhadap wisatawan serta menjaga sarana prasarana wisata. Dengan diselenggarakannya program desa wisata, ada beberapa manfaat yang dirasakan yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, menambah penghasilan desa, serta dapat berinovasi dalam mengembangkan desa.

### **Dana**

Dana dibutuhkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang mendukung perkembangan pariwisata, seperti Dana alokasi khusus (DAK) fisik disektor pariwisata digunakan untuk pembangunan infrastruktur sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik digunakan untuk pelatihan masyarakat lokal demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Penyaluran dana dilakukan secara bertahap karena ada syarat desa mana

saja yang bisa mendapatkan dana alokasi khusus dari pusat bahwa desa tersebut bisa ditetapkan menjadi desa wisata, Ada beberapa desa wisata yang sudah mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) fisik seperti bangunan infrastruktur dari 14 desa wisata dalam surat keputusan bupati kabupaten selayar nomor 128/III/tahun 2018 tentang penetapan Kawasan desa wisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Seperti desa patilereng kecamatan Bontosikuyu yaitu wisata punagaan, Desa Bontomarannu kecamatan Bontomanai yaitu wisata puncak tanadoang, dan Desa Bonto Lebang kecamatan Bontoharu yaitu wisata Laguna Beach. Dana alokasi khusus (DAK) nonfisik itu juga seperti itu yang diajukan dan dianggarkan untuk meningkatkan kualitas sdm, untuk satu kali pelatihan pembinaan berkisar 60-80 juta rupiah. Pelatihan-pelatihan paling banyak diselenggarakan di dibidang SDM dan EKRAF, bagaimana cara menghadapi desa wisata dalam digitalisasi dan pelatihan untuk komponen pariwisata itu sendiri agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Desa wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar ada 14 desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Selayar Nomor 128/III/tahun

2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kemudian wawancara juga dilakukan pada pegiat wisata pantai laguna desa Bontolebang untuk mengetahui dana yang digunakan untuk mengelola wisata tersebut sebagai berikut: Dana yang digunakan untuk desa wisata ini dari hasil patungan pengelola desa wisata itu sendiri yaitu pokdarwis. Jumlah pengunjung Desa Wisata Bontolebang selama berjalannya Program Desa Wisata kurang lebih 100 orang/bulan.

Dana pengelolaan desa wisata dari Dinas Pariwisata telah disalurkan pada masing-masing pemerintah desa. Namun, hanya dua desa yang menyalurkan dananya ke pengelola objek wisata. Desa wisata yang sampai saat ini belum mendapatkan dana dari desa yaitu wisata pantai laguna desa Bontolebang. Dilihat dari infrastrukturnya yang sangat belum memadai untuk dikatakan sebagai desa wisata yang sudah memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk desa mandiri.

### **Informasi dan Teknologi**

Peran informasi dan teknologi sangatlah penting dalam bidang sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar karena dengan adanya teknologi

informasi dan komunikasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih mudah tentang tempat-tempat wisata yang ada sekalipun di daerah terpencil. Saat ini hampir semua orang memiliki *handpone* sehingga dapat mengakses berbagai informasi di beberapa media sosial. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk dapat memperkenalkan program desa wisata yakni dengan melakukan promosi di berbagai media sosial serta mengadakan beberapa *event* untuk menarik wisatawan.

Bidang pemasaran memang tugasnya untuk melakukan promosi. Sedangkan bidang destinasi dia merancang destinasinya seperti apa, daya tarik wisatanya seperti apa. Dari rancangan-rancangan itulah muncul yang namanya desa wisata. Ada 14 desa wisata yang di SK-kan. Nah, apabila ada desa wisata yang sudah layak jual pekerjaannya maka bidang pemasaran yang mempromosikan dan menjual desa wisata yang bersangkutan. Jadi bidang destinasi yang siapkan komponen utamanya yang 3A yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Apabila ketiga komponen ini sudah lengkap artinya ini sudah layak jual. Kami dibidang pemasaran kemudian berusaha mempromosikan DTW yaitu Daya Tarik wisata. Cara mempromosikannya

yaitu ada 3 cara melalui media cetak, elektronik, dan media sosial serta memiliki *website* khusus dinas pariwisata itu ayokeselayar.com, semua informasi dan kegiatan kantor dan promosi ada di *website* Dinas Pariwisata Kabupaten Selayar. Lalu, promosinya juga dalam bentuk partisipasi *event* yang dibuat sendiri seperti *event local* yaitu *event* tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Selayar yaitu Festival Takabonerate yang dilaksanakan setiap tahunnya kecuali dua tahun belakangan ini karena pandemi covid-19 di tahun 2020-2021 tidak dilaksanakan. InshaAllah bulan 10 dilaksanakan kembali tahun 2022 yang memiliki tanggal paten setiap tahunnya pada tanggal 23-28 oktober. Ada juga *event-event* lainnya yaitu *wonderful sail* biasanya kedatangan tamu wisatawan luar dari kapal pesiar luar negeri maupun domestik. *Event* budaya, *event* komunitas motor, festival bajo, *event* adingin-dingin, festival attuanarituriere semua *event* yang dilaksanakan itu untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara karena sasaran terakhir kita melakukan promosi itu untuk mendatangkan wisatawan ke kabupaten selayar dan disitu yang diukur target keberhasilannya dinas pariwisata dari banyaknya kunjungan. Semua bidang itulah yang menjadi

sasarannya dari berapa banyaknya kunjungan wisatawan perberjalannya suatu program desa wisata. Semua bidang bersinergi memiliki tujuan sasaran untuk mendatangkan wisatawan ke desa wisata yang di SK-kan. Jadi selain kita bikin *event local*, kami juga ikut partisipasi *event* kabupaten lain maupun skala *event* nasional dan internasional serta mempromosikan selayar yang memiliki potensi yang sangat tinggi dalam bidang sektor pariwisata. Biasa juga kami mendatangkan media blogger, *influencer* dan lain-lain yang dikemas dalam kegiatan *familier session tour famtrip*.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwasanya ada 3 cara mempromosikan desa wisata yaitu melalui media cetak, elektronik, dan media social serta pada *website* milik Dinas Pariwisata sendiri. Pernyataan ini didukung oleh ketiga informan desa wisata bahwasanya dalam memasarkan objek wisata paling efektif melalui media sosial.

### **Sarana dan Prasarana**

Unsur-unsur yang melengkapi dengan tujuan memudahkan prosesi kegiatan pariwisata agar dapat berjalan lancar adalah sarana dan prasarana.

Hasil wawancara Kepala Bidang Destinasi Pariwisata sebagai berikut: Terkhusus dibidang destinasi, kami menyiapkan lokasi destinasinya bagaimana tempatnya apakah cocok dijadikan objek wisata atau layak kah lahannya jika ada bantuan dari pemerintahan. Untuk sarana dan prasarananya dilihat dari 3A. Untuk Program Desa Wisata sekarang dari tahun 2021 itu bidang ekraf memiliki program Anugerah Desa Wisata Indonesia yang dilombakan seluruh Indonesia dan alhamdulillah tahun kemarin 2021 Desa bahujuang masuk 100 besar. Untuk potensi desa wisata itu sendiri bagaimana masing-nasing pengelola seperti pokdarwis, bumdes dan kepala desanya yang ikut aktif dalam mengembangkan desa wisata melalui program Dispar. Masyarakat setempat sudah pasti dilibatkan dalam program desa wisata ini karena tanpa adanya masyarakat pengelola pokdarwis, bumdesnya itu tidak mungkin bisa berjalan program desa wisata yang dilaksanakan selama setahun akhir ini.

Wawancara juga dilakukan pada pegiat Wisata Puncak Tanadoang Desa Bontomarannu sebagai berikut: Setiap hari jumat itu ada jadwal untuk jum'at bersih untuk melakukan tatacara pengelolaan sarana prasarana atau

fasilitas yang ada di desa wisata. Fasilitas yang tersedia di lokasi desa wisata itu seperti: *home stay, toilet, restaurant, view*. Namun, fasilitas yang tersedia belum terpenuhi spm dalam menunjang komponen pariwisata itu sendiri.

Sarana prasarana di 3 desa wisata yang menjadi prioritas Dinas Pariwisata belum bisa dikatakan memenuhi spm dalam menunjang komponen pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara pada ketiga pengelola desa wisata menyatakan bahwa sarana prasarana masih kurang terutama di desa Bontolebang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah Dinas Pariwisata untuk melihat langsung keadaan lokasi desa wisata Bontolebang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan desa mandiri di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan belum maksimal dalam pengembangan program desa wisata dilihat dari keempat indicator yang digunakan yaitu: 1) Sumber daya manusia (SDM) pengelola desa wisata

yang masih memerlukan pelatihan dan pembinaan yang berupa secara langsung ke lokasi mempraktikkan karena pengelola wisata khususnya di Desa Bontolebang masih minim dalam hal pengetahuan mengenai komponen pariwisata. 2) Dana Dinas Pariwisata masih kurang dan belum menyalurkan langsung untuk pengembangan objek wisata yang ada dilokasi karena terjadinya miskomunikasi antar pemerintah desa dengan pengelola desa wisata terkhusus di Wisata Laguna Beach Desa Bontolebang yang masih kurang dalam hal infrastruktur. 3) Informasi dan teknologi, mengenai informasi teknologi pemerintah telah berupaya dalam melakukan promosi melalui media cetak, media sosial dan memiliki *website* resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar. 4) Sarana dan prasarana, sangatlah penting dalam menunjang komponen pariwisata tersebut agar dapat memudahkan prosesi kegiatan dalam berwisata, pemerintah masih kurang dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator. Dilihat dari minimnya fasilitas yang tersedia terkhusus di desa wisata bontolebang.

## REFERENSI

- Mamonto, H. (2021). Strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), pp. 1–11.
- Muntasib, E. K. S., dkk. (2014). *Interpretasi Alam*. Bogor: IPB Press.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. New York: Methuen. National Parks Today (1991): Green Guide for Tourism, 31, pp. 224–238. PNPMM Mandiri, diakses pada tanggal 23 Februari 2018.
- Paradana, A., Muhammad., & Hamrun. (2021). Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(5).
- Sakti, H. S. (2010). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sakti, H. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sastrayuda, G. S. (2010). *Konsep Pengembangan Desa Wisata*. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure. Diakses pada 11 November 2016.
- Wardana, D., Zainal, & Ginting, A. H. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211–219.